

**PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM
PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS
(STUDI KASUS: MPP NOMOR:10/ B/ Mj.PPN/ 2009 jo.
PUTUSAN MPW NOMOR:131/ MPW-JABAR/ 2008)**

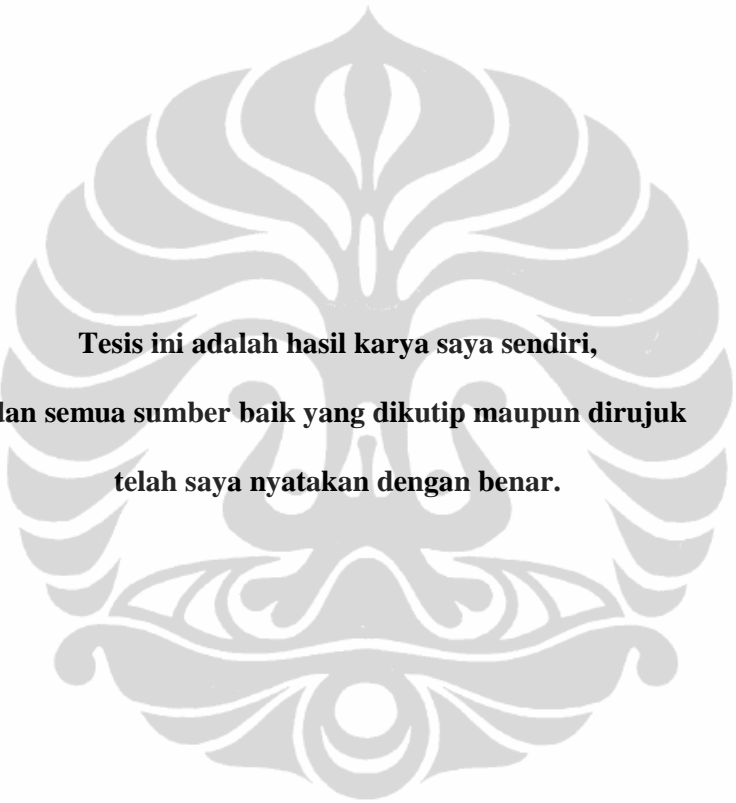
TESIS

**YANTI JACLINE JENNIFER TOBING
0806428174**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yanti Jacline Jennifer Tobing

NPM : 0806428174

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yanti Jacline Jennifer Tobing
NPM : 0806428174
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS
NOTARIS DALAM PELANGGARAN
JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS
(STUDI KASUS: MPP NOMOR:10/ B/
Mj.PPN/ 2009 jo. PUTUSAN MPW
NOMOR:131/ MPW-JABAR/ 2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. 

Penguji : Peter P. Latumanten, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, nasehat, semangat, bantuan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran serta perhatiannya dalam memberikan petunjuk-petunjuk bagi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis dibidang administratif serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Martua Batubara S.H., selaku sekretaris Majelis Pengawas Pusat, dan Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM yang telah menyediakan waktu, ilmu pengetahuan dan wawasannya dalam wawancara dengan penulis.

5. Keluarga tercinta, Papi, Mami, Zonna Tiur Tobing Burlace, Priscilla S.Tobing, Fritz Martin Tobing, Graham Anthony Burlace, keponakan tercinta Nicole, Nikita, Jesse serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dalam doa dan memberikan semangat serta arahan sehingga terselesaikannya perkuliahan dan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat penulis, Rafika Arifina, Herlina Latief, Yosie, Chairun Nasra, Nuzulla Khairani, Surayya Luthfi, Indar Sri Bulan serta sahabat-sahabat dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Beverly Charles Panjaitan, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasehat, perhatian, kasih sayang dan doa kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Evelin Hutagalung, Astari Meutia, Rinanda Dangin, Magnesia Putri Anastasia, Febria Airlia Subaya, Nike Wijaya, Ratu Ryanti, Yuri Annisa, Dorothea Putik Puruhita, Alfajar Dellya Putri, Melanie Ananta, Veronica Alvina, Alice Angeliqne, Indah Kusuma, Maureen Marissa.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 30 Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yanti Jacline Jennifer Tobing
NPM : 0806428174
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non –exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM
PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS (STUDI
KASUS: MPP NOMOR:10/B/Mj.PPN/2009 jo. PUTUSAN MPW
NOMOR:131/MPW-JABAR/2008)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan sama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada Tanggal: 30 Juni 2010

Yang membuat pernyataan

(Yanti Jacline Jennifer Tobing)

ABSTRAK

Nama : Yanti Jacline Jennifer Tobing
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP nomor: 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor: 131/MPW-JABAR/2008)

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. UUJN menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan berfungsi sebagai “kaidah hukum”, sementara Kode Etik Notaris yang memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Pengawasan baik preventif maupun represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasan preventif dilakukan oleh negara sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah (Menteri Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan oleh Organisasi Profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJN. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap pelanggaran kode etik bukan hanya dilakukan oleh I.N.I saja, berdasarkan ketentuan UUJN pasal 70, MPW dapat melaksanakan persidangan terhadap dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik yang berasal dari rekomendasi I.N.I atau masyarakat. Tanpa adanya laporan dari masyarakat pengawasan tetap dilaksanakan karena temuan MPN berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan rutin secara berkala setahun sekali atau setiap waktu yang dianggap perlu. Berdasarkan kasus yang diteliti, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari MPN terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dan kode etik notaris, karena notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci:

Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris, Pelanggaran Jabatan, Kode Etik Notaris

ABSTRACT

Name : Yanti Jacline Jennifer Tobing
Study Program : Magister of Notaries
Title : Supervision of Notary Supervision Council in the breach of position and Code of Ethics (Case study: MPP No.: 10/B/Mj.PPN/2009 jo. MPW's decree No.: 131/MPW-JABAR/2008)

Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as “principles of law” for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as “moral principles” for notaries practice in Indonesia. Supervision, both preventive as well as repressive is required for the execution of duties of Public Notary as public official. Preventive supervision is executed by the state as the benefactor of authorities which is delegated to government institutions (the Minister of Law and Human Rights), while repressive supervision is executed by Profession Organization using Code of Ethics and the Law of Notaries as their guidance. The Notaries’ Supervision council is not only in charge of conducting supervision and examination of notaries, but also in charge of imposing certain sanctions to Notaries proven for perpetrating breach in their position as public notary. Supervision for the violation of code of ethics is not executed by the Indonesian Notaries Union only, based on the stipulation of the Law No. 30 of 2004 Article 70, the Local Supervision Council (MPW) may exercise tribunal to the claim of violation of duty and code of ethics from the recommendation of I.N.I (Indonesian Notaries Union) or the public. Even without report from the public, supervision is still exercised due to finding of the State Supervision Council in relation to their routine periodic supervision once a year, or as deemed necessary. Based on the case researched, a firmer action is required from the State Supervision Council to the violator of Notaries’ duties and code of ethics, since public notary as public officer is required to uphold public’s trust in completing their tasks.

Keywords:

Supervision, Notaries Supervision Council, breach of position, Notaries’ Code of Ethics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Metode Penelitian	9
1.3.1. Studi Pustaka.....	9
1.3.2. Penelitian lapangan	10
PEMBAHASAN	
2.1. Pengertian, Tugas Dan Wewenang Notaris.....	12
2.1.1. Pengertian Notaris	18
2.1.2. Notaris Civil Law	21
2.1.3. Notaris Common Law.....	22
2.1.4. Persyaratan Jabatan Notaris	23
2.1.5. Sumpah dan Janji Jabatan	25
2.1.6. Pemberhentian Notaris.....	26
2.1.7. Kewajiban, Tugas dan Wewenang Notaris.....	28
2.1.8. Larangan Bagi Notaris.....	37
2.2. Kode Etik Notaris.....	38
2.2.1. Kewajiban Etis Notaris.....	41
2.2.2. Larangan Etis Notaris	43
2.2.3. Pengecualian	45
2.3. Majelis Pengawas Notaris	46
3.3.1. Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris	50
3.3.2. Majelis Pengawas Daerah	52
3.3.3. Majelis Pengawas Wilayah.....	54
3.3.4. Majelis Pengawas Pusat.....	56
3.3.5. Dewan Kehormatan Notaris.....	58
2.4. Analisa Hukum	60
2.4.1. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris	67
2.4.2. Tindakan MPN terhadap Dugaan Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris tanpa adanya pengaduan dari masyarakat	70

PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	75
3.2. Saran	76
DAFTAR REFERENSI	77
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kode Etik Notaris

LAMPIRAN 2

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 10/ B/ Mj.PPN/ 2009

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara

